

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana suatu Negara atau daerah sedang melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup riil perkapita. Sehingga tujuan dari pembangunan ekonomi selain untuk meningkatkan pendapatan nasional riil juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas (Irawan dalam Dedifu, 2015).

Pada dasarnya pembangunan nasional berkaitan erat dengan pembangunan regional (daerah). Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata termasuk pemerataan pembangunan maupun hasil pendapatan antar daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah erat kaitannya dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki setiap daerah, akan tetapi dalam memaksimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada untuk mencapai sasaran seperti di atas bukan suatu perkara yang mudah. Sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan penduduk. Selain itu tingginya pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh setiap elemen masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan sebagai ukuran untuk menganalisis mengenai kondisi suatu perekonomian di suatu negara maupun daerah. Pertumbuhan ekonomi memberi informasi mengenai kondisi perekonomian serta berbagai sektor yang memberikan hasil tambahan

pendapatan pada laju perekonomian periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menganalisis mengenai tingkat keberhasilan suatu pembangunan ekonomi. Selain itu juga dapat digunakan untuk menentukan arah suatu pembangunan ekonomi pada periode yang akan datang.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, salah satu tolak ukur untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah provinsi atau kabupaten dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi/kabupaten) memberi gambaran mengenai kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah pada periode tertentu. Terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk menyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu pendekatan produksi serta penggunaan. Kedua pendekatan memberikan komposisi data dari nilai tambah yang dirinci menurut kegiatan ekonomi atau lapangan usaha serta komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan mengenai penggunaan dari nilai tambah tersebut

Pada dasarnya setiap upaya yang dilakukan dalam pembangunan ekonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat daerah. Dalam menempuh upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama harus berperan aktif dalam membangun daerah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemerintah dan masyarakat saling bersinergi

dalam menyusun strategi untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada dan membangun perekonomian daerah.

Menurut Arsyad dalam Lahama, *et al* (2018) masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang digunakan. Dimana kebijakan tersebut didasarkan pada spesialisasi daerah yang berkaitan dengan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Adanya pembangunan daerah tersebut digunakan untuk menciptakan kesempatan kerja dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Hal itu dikarenakan apabila laju pertumbuhan penduduk tinggi namun kinerja pembangunan sumber daya manusianya rendah maka kemungkinan untuk terciptanya kesempatan kerja yang memadai juga rendah. Hal itu menyebabkan angka pengangguran meningkat karena pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengefektifkan pembangunan daerah yaitu menggunakan sistem pemerintahan yang baru yang disebut dengan otonomi daerah. Dengan adanya sistem otonomi daerah, pemerintah dapat memberi reaksi yang positif dalam pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki oleh daerah. Dengan adanya otonomi daerah tentunya akan memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk merancang pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah otonomi daerah berlaku, peran pemerintah menjadi semakin besar dalam

mengelola daerahnya. Besarnya peranan yang dimiliki oleh pemerintah dalam meningkatkan pelayanan serta membangun suatu daerah tentunya dihadapkan dengan berbagai tuntutan serta tantangan.

Pada Q.S Al Baqarah ayat 29 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ  
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan seluruh sumber daya yang ada di bumi ini untuk kehidupan manusia. Dengan demikian keberadaan manusia di bumi memiliki peran yang sangat besar dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Sumber daya yang ada dapat digunakan untuk kelangsungan hidup manusia yang bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat-Nya. Sehingga masyarakat bersama pemerintah mempunyai peran untuk mengelola sumber daya alam yang ada di setiap daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki guna menyejahterakan masyarakat secara merata.

**Tabel 1.1**  
PDRB dan Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran  
di DIY, 2017 – 2018

Kabupaten / Kota	PDRB (Triliun Rp)		Pertumbuhan (%)	Andil (%)
	ADHK			
	2017	2018		
Kulon Progo	6.97	7.73	10.84	7.94
Bantul	17.21	18.15	5.47	18.81
Gunungkidul	12.28	12.91	5.16	13.50
Sleman	31.14	33.14	6.42	33.71
Yogyakarta	24.77	26.13	5.49	26.03
Jumlah 5 Kab/Kota	92.37	98.06	6.16	100
DIY	92.30	98.03	6.20	100

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2019

Berdasarkan data pada tabel 1.1 mengenai PDRB dan pertumbuhan atas dasar harga konstan menurut pengeluaran di DIY tahun 2017-2018, dapat diketahui kontribusi untuk setiap kabupaten/kota dalam menyumbang nilai tambah bervariasi. PDRB Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan dari 6,97 triliun menjadi 7,73 triliun rupiah. Naiknya nilai tambah dari Kabupaten Kulon Progo disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo dipicu oleh aktivitas pembangunan Bandara Yogyakarta Internasional Airport yang memiliki nilai investasi yang besar. Sedangkan PDRB Kabupaten Bantul pada tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan dari 17,21 triliun menjadi 18.15 triliun. Namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul masih di bawah Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 5,47 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di DIY, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul terendah yaitu sebesar 5,16 persen. Meskipun pertumbuhan ekonominya terendah namun nilai PDRB Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan dari 12,28 triliun menjadi 12,91

triliun. PDRB Kabupaten Sleman pada tahun 2017 ke 2018 juga mengalami kenaikan dari 31,14 triliun menjadi 33,14 triliun. Naiknya PDRB Sleman dari tahun 2017 ke 2018 disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi meskipun masih di bawah Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 6,42 persen. PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2017-2018 juga mengalami kenaikan dari 24,77 triliun menjadi 26,13 triliun. Meskipun PDRB Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke 2018, namun pertumbuhannya masih di bawah Kabupaten Sleman yaitu sebesar 5,49 persen. Berdasarkan data di atas diketahui pula kontribusi untuk setiap kabupaten/kota dalam menyumbang nilai tambah terhadap perekonomian DIY tahun 2018. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki kontribusi tertinggi yaitu sebesar 33,71 persen dibandingkan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi DIY. Kontribusi yang tinggi dari Kabupaten Sleman mendasari peneliti tertarik dan memilih Kabupaten Sleman sebagai wilayah studi kasus yang akan diteliti.

**Tabel 1.2**  
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lap. Usaha  
Kabupaten Sleman Tahun 2014-2018 (juta rupiah)

No	Kategori PDRB Non Migas	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.968.070,7	2.003.474,9	2.016.941,4	2.040.451,7	2.071.604,2
2.	Pertambangan dan Penggalian	115.316,4	115.517,4	115.645,9	115.878,5	126.231,2
3.	Industri Pengolahan	3.513.598,4	3.582.533,8	3.765.148,7	3.980.364,1	4.203.118,3
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	33.932	34.426,8	39.848,2	41.413,6	42.353,1
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.051,2	13.445,4	13.693,3	14.140,3	14.887,2
6.	Konstruksi	2.975.378,7	3.107.439,5	3.252.179,9	3.481.506,1	3.936.807,4
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.003.871,3	2.132.734,9	2.276.434	2.396.461,4	2.517.080
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.708.682,4	1.775.484,4	1.906.956,6	2.009.538,3	2.171.673,7
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.581.614,6	2.738.288,4	2.890.850,2	3.067.088,3	3.275.256,3
10.	Informasi dan Komunikasi	2.757.450,5	2.908.483	3.152.445,2	3.353.383,7	3.560.299,5
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	778.030,1	845.349,5	886.738,5	911.738,4	977.150,9
12.	Real Estate	2.188.665,9	2.333.477,3	2.458.358,7	2.581.857,8	2.713.511,7
13.	Jasa Perusahaan	51.539,4	552.150,3	569.749,9	602.866,6	636.152,6
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.618.043,2	1.702.107,9	1.804.658,7	1.876.409	1.953.565,1
15.	Jasa Pendidikan	2.681.853,4	2.893.218,8	2.990.810,7	3.161.823,1	3.351.494,9
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	641.582,9	690.675,4	720.867,6	764.436,2	810.809
17.	Jasa lainnya	618.537,2	669.199,2	702.047,4	741.233,6	777.210
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		26.713.071,2	28.098.006,9	29.563.375,2	31.140.590,6	33.139.204,9

Sumber : BPS Kabupaten Sleman, 2019

Pada tabel 1.2, menjelaskan mengenai kontribusi dari 17 sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Sleman atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha selama 5 tahun terakhir (2014-2018). Melimpahnya sumber daya yang

tersedia di Kabupaten Sleman tentunya menciptakan adanya berbagai macam sektor ekonomi. Dari berbagai sektor ekonomi yang dimiliki tentunya akan memberikan kontribusi pendapatan daerah yang berbeda-beda. Selama 5 kurun waktu terakhir, pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sebesar 1.968.070,7 juta rupiah sedangkan tahun 2018 sebesar 2.071.604,2 juta rupiah. Meskipun dari tahun ke tahun kontribusi dari sektor tersebut tidak naik secara signifikan, namun sektor ini terus memberi peningkatan atas kontribusinya untuk setiap tahunnya. Hal tersebut didukung oleh luasnya daerah pertanian yang ada di wilayah Sleman. Pada sektor pertambangan dan penggalian, dari tahun 2014 hingga 2018 sektor ini juga memberikan kontribusi PDRB yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 sebesar 115.316,4 juta rupiah sedangkan tahun 2018 sebesar 1158.78,5 juta rupiah. Selama 5 tahun kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian hanya naik sebesar 562,1 juta rupiah. Hal tersebut dikarenakan wilayah Kabupaten Sleman hanya memiliki sumber daya alam pertambangan yang sedikit. Sehingga jika dibandingkan dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor tersebut yang lebih banyak berkontribusi daripada sektor pertambangan dan penggalian pada PDRB Kabupaten Sleman selama 5 kurun waktu tersebut.

Pada sektor industri pengolahan, selama 5 tahun terakhir juga memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Sleman yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 kontribusi sektor industri pengolahan ini sebesar 3.513.598,4 juta rupiah sedangkan tahun 2018 sebesar 4.203.118,3 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan sektor yang telah dipaparkan di atas, sektor industri



pengolahan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Sleman. Hal tersebut diakibatkan, wilayah sleman telah menjadi wilayah industri. Sedangkan pada sektor pengadaan listrik dan gas, meskipun kontribusi setiap tahunnya terhadap PDRB terus meningkat namun nilai tambah yang diperoleh masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan 3 sektor di atasnya. Pada tahun 2014 kontribusi sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 33.932 juta rupiah sedangkan tahun 2018 sebesar 42.353,1 juta rupiah.

Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang dari tahun 2014-2018 juga memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Sleman yang terus meningkat untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2014 sebesar 13.051,2 juta rupiah sedangkan tahun 2018 sebesar 14.887,2 juta rupiah. Namun, jika dibandingkan dengan sektor pengadaan listrik dan gas, sektor ini lebih sedikit berkontribusi pada PDRB Sleman. Sedangkan pada sektor konstruksi, selama 5 tahun terakhir juga memberikan kontribusi yang terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2014 sebesar 2.975.378,7 juta rupiah sedangkan tahun 2018 sebesar 3.936.807,4 juta rupiah. Namun jika dibandingkan dengan sektor industri pengolahan, kontribusi sektor konstruksi terhadap PDRB Kabupaten Sleman masih di bawahnya.

Pada sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor, dari data di atas menunjukkan dari tahun ke tahun sektor ini memberikan kontribusi pada PDRB Kabupaten Sleman yang terus meningkat. Tahun 2014 sebesar 2.003.871,3 juta rupiah sedangkan tahun 2018 sebesar 2.517.080 juta rupiah. Meskipun memberikan kontribusi yang terus meningkat, namun jika

dibandingkan dengan sektor konstruksi, sektor ini masih berada di posisi bawahnya. Selama 5 tahun terakhir sektor transportasi dan pergudangan juga memberikan kontribusi pada PDRB Sleman yang terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2014 sebesar 1.708.682,4 juta rupiah sedangkan tahun 2018 sebesar 2.171.673,7 juta rupiah. Kontribusi dari sektor ini masih di bawah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum selama 5 tahun terakhir juga memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Sleman yang terus meningkat untuk setiap tahunnya. Tahun 2014 sebesar 2.581.614,6 juta rupiah sedangkan tahun 2018 sebesar 3.275.256,3 juta rupiah. Namun jika dibandingkan dengan sektor konstruksi, sektor ini masih berada di posisi bawahnya. Sedangkan pada sektor informasi dan komunikasi setiap tahunnya juga memberikan kontribusi yang terus meningkat. Pada tahun 2014 sebesar 2.757.450,5 juta rupiah sedangkan tahun 2018 sebesar 3.560.299,5 juta rupiah. Namun kontribusi dari sektor ini masih dibawah dari sektor konstruksi.

Pada sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor ini juga memberikan kontribusi yang terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2014-2018 terhadap PDRB Kabupaten Sleman. Kontribusi tahun 2014 sebesar 778.030,1 juta rupiah sedangkan tahun 2018 sebesar 977.150,9 juta rupiah. Sektor ini lebih banyak berkontribusi jika dibandingkan dengan sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan pada sektor real estate, sektor ini juga memberikan kontribusi yang terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2014 sebesar 2.188.665,9 juta rupiah sedangkan tahun 2018 sebesar 2.713.511,7 juta rupiah. Sektor ini member

kontribusi lebih banyak jika dibandingkan dengan sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor.

Banyaknya perusahaan yang tersebar di Kabupaten Sleman tentunya sektor jasa perusahaan juga memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Sleman. Berdasarkan data di tabel, selama 5 tahun terakhir kontribusi dari sektor ini terus meningkat untuk setiap tahunnya. Tahun 2014 sebesar 515.392,4 juta rupiah sedangkan tahun 2018 sebesar 636.152,6 juta rupiah. Kontribusi dari sektor ini masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan sektor jasa keuangan dan asuransi. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan social wajib juga memberikan kontribusi yang terus meningkat untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2014 sebesar 1.618.043,2 juta rupiah sedangkan tahun 2018 sebesar 1.953.565,1 juta rupiah. Kontribusi dari sektor ini masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan sektor transportasi dan pergudangan.

Pada sektor jasa pendidikan selama 5 tahun terakhir memberikan kontribusi pada PDRB Kabupaten Sleman yang terus meningkat untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2014 sebesar 2.681.835,4 juta rupiah sedangkan tahun 2018 sebesar 3.351.494,9 juta rupiah. Kontribusi dari sektor ini masih dibawah sektor informasi dan komunikasi. Sedangkan pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan social selama 5 tahun terakhir juga memberikan kontribusi yang terus meningkat untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2014 sebesar 641.582,9 juta rupiah sedangkan tahun 2018 sebesar 810.809 juta rupiah. Kontribusi dari sektor ini lebih besar jika dibandingkan dengan sektor jasa perusahaan.

Dari 17 sektor ekonomi, sektor jasa lainnya yang ada di Kabupaten Sleman juga berkontribusi terhadap PDRB yang terus meningkat untuk setiap tahunnya dari tahun 2014-2018. Tahun 2014 sebesar 618.537,2 juta rupiah sedangkan tahun 2018 sebesar 777.210 juta rupiah. Kontribusi dari sektor jasa lainnya juga lebih besar jika dibandingkan dengan sektor jasa perusahaan. Dengan melihat besarnya kontribusi dari setiap kategori sektor ekonomi dalam suatu perekonomian maka peneliti dapat melihat struktur perekonomian suatu wilayah. Berdasarkan data di atas diketahui 3 sektor ekonomi utama yang ada di Kabupaten Sleman yang mempunyai kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Sleman tahun 2014-2018 yaitu sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor informasi dan komunikasi. Dengan melihat besarnya kontribusi dari berbagai sektor ekonomi yang ada, maka dapat ditentukan sektor unggulan atau potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman dalam menunjang pembangunan daerah.

**Tabel 1.3**  
Indikator-indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman 2017-2018

Kegiatan Utama	2017	2018
Angkatan Kerja (orang)	659.305	675.286
Bukan Angkatan Kerja (orang)	280.281	272.868
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,17	71,22
Tingkat Pengangguran (%)	3,51	4,40

Sumber : BPS Kabupaten Sleman, 2019

Berdasarkan pada tabel 1.3 pada tahun 2017, angkatan kerja di Kabupaten Sleman berjumlah 659.305 orang sedangkan tingkat pengangguran 3,51 persen. Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa kelompok bukan angkatan kerja ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja sehingga menjadi masuk

dalam kelompok angkatan kerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya angkatan kerja pada tahun 2018 menjadi 675.286 orang sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan dari 70,17 persen menjadi 71,22 persen. Namun dengan meningkatnya partisipasi angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya kesempatan kerja yang tinggi maka hal tersebut menyebabkan tidak terserapnya angkatan kerja yang menjadikan tingkat pengangguran di Kabupaten Sleman pada tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan dari 3,51 persen menjadi 4,40 persen.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, pada tahun 2017-2018 Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memberikan andil terbesar pada PDRB Provinsi DIY dibandingkan kabupaten/kota lain di wilayah tersebut. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Sleman lebih unggul dibandingkan lainnya karena memberikan nilai tambah yang besar. Pada tahun 2017-2018 data angkatan kerja di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja pada tahun tersebut mengalami kenaikan. Namun dilain sisi, tingkat pengangguran di Kabupaten Sleman pada tahun 2017-2018 juga mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peluang kerja yang tersedia di Kabupaten Sleman belum memadai sehingga menyebabkan tingkat pengangguran meningkat. Berdasarkan kondisi tersebut maka peneliti ingin mengetahui apakah sektor unggulan yang ada di Kabupaten Sleman dapat berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja sehingga dapat berperan dalam mengatasi pengangguran dan tujuan dari pembangunan ekonomi daerah dapat tercapai.

Studi yang dilakukan oleh Ibrahim tahun 2018 tentang sektor unggulan dalam penyerapan tenaga kerja menyatakan bahwa sektor unggulan berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Sektor unggulan yang mempunyai daya serap tenaga kerja yang tinggi dikarenakan pertumbuhan dan kontribusi ekonominya dalam pendapatan daerahnya tinggi. Namun pada hasil studinya terdapat sektor non basis yang juga memiliki kontribusi tinggi dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor non basis yang mempunyai daya serap tenaga kerja yang tinggi didukung oleh faktor-faktor eksternal seperti ketersediaan lahan yang luas serta iklim yang menguntungkan seperti curah hujan, tingkat kesuburan tanah, dan faktor sosial budaya yang ada, seperti gotong royong.

Studi yang dilakukan oleh Lahama, *et al* tahun 2018 tentang sektor unggulan dalam penyerapan tenaga kerja menyatakan bahwa sektor ekonomi yang mempunyai daya serap tenaga kerja yang tinggi terdiri dari sektor unggulan. Pada studinya yang menjadi sektor unggulan yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor listrik, gas, dan air minum. Studi yang dilakukan oleh Lamaha, *et al* tahun 2018 juga menyatakan kontribusi dari sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja menurun. Hal itu dikarenakan adanya peralihan penduduk yang awalnya bekerja di sektor pertanian menjadi bekerja di sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas, dan air minum. Peralihan itu disebabkan karena pekerja ingin mendapatkan pendapatan yang lebih yang tidak bergantung dengan musim.

Berdasarkan studi mengenai sektor unggulan dalam penyerapan tenaga kerja yang telah dilakukan, peneliti menemukan gap penelitian bahwa sektor ekonomi

unggulan pada suatu wilayah tidak semua mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Selain itu, berdasarkan literatur yang ada peningkatan jumlah PDRB akan berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, begitu juga sebaliknya penurunan jumlah PDRB akan berpengaruh pada penurunan penyerapan tenaga kerja. Namun berdasarkan realita, sektor ekonomi yang mempunyai nilai PDRB yang tinggi belum tentu menyerap tenaga kerja yang banyak.

Adanya gap penelitian, gap teori, serta fenomena yang ada maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi sektor ekonomi unggulan dalam penyerapan tenaga kerja. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Sektor Unggulan Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Sleman Tahun 2014-2018” dengan metode penelitian SLQ, DLQ, Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Shift-share, Overlay serta Koefisien Tenaga Kerja.

## **B. BATASAN MASALAH**

Dalam penelitian ini agar pembahasan tidak melebar dari tujuan penelitian, maka peneliti membatasi bahwa pembahasan hanya melingkupi sektor ekonomi yang dapat di lihat pada 17 sektor ekonomi di Kabupaten Sleman tahun 2014-2018. Selain itu, penyerapan tenaga kerja dapat dilihat melalui 9 lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Sleman tahun 2014-2018. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel yaitu Produk Domestik Bruto (PDRB) serta data ketenagakerjaan.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apa sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Sleman dari sisi penciptaan nilai tambah pada tahun 2014-2018 ?
2. Bagaimana daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Sleman tahun 2014-2018 ?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sektor ekonomi unggulan dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 – 2018.
2. Untuk mengetahui daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Sleman tahun 2014 – 2018.

### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Dengan adanya penelitian ini harapannya dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak yaitu :

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai topik yang dibahas serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.



2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi bagi masyarakat mengenai kondisi ekonomi di Kabupaten Sleman.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan di bidang ekonomi khususnya di Kabupaten Sleman.